PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI PEKANBARU

(Studi pada organisasi perkumpulan kesejahteraan penyandang cacat)

Oleh: GUSTI INDAH PRATIWI

Pratiwigustiindah@yahoo.co.id

Pembimbing: Dra.Indrawati,M.Si

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.HR Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telf/fax 0761-63277

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasi dan sering didekriminasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Penelitian ini tentang peran pemerintah dalam perlindungan sosial penyandang disabilitas (studi pada organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat). Penelitian tentang peran pemerintah dalam perlindungan sosial penyandang disabilitas di Pekanbaru mencakup hal tentang kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan melalui organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC). Perkumpulan kesejahteraan penyandang cacat adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mempunyai kepedulian dan keberadaannya diharapkan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara serta menghapus berbagai pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap penyandang cacat dapat dilihat dari kuesioner yang disebar. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 sampel untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat menjawab masalah dari penelitian. Peneliti menggunakan analisa korelasi spearman karena data yang dikumpulkan berupa data ordinal. Dari hasil penelitian diketahui adanya peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas walaupun belum seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Penyandang Cacat, Peran Pemerintah, Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC).

**THE GOVERNMENT ROLE IN SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH
DISABILITIES IN THE CITY OF PEKANBARU**
(Study on the organization welfare associations with disabilities)

By: GUSTI INDAH PRATIWI

Pratiwigustiindah@yahoo.co.id

Counsellor: Dra. Indrawati, M.Si

*Sociology Major the Faculty of Social Sciences and Sciences Political Riau University,
Pekanbaru, Indonesia*

*Campus Bina Widya at HR Soebrantas Street Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293*

Telf/fax 0761-63272

ABSTRACT

Is a person with disabilities or physical state of the biological system is different from other in general. Persons with disabilities is a group of people who have been marginalized and often discrimination in social and political life. This research on the government role in protection for people with disabilities in Pekanbaru (study on the organization welfare associations with disabilities). This research on the government role in social protection welfare associations with disabilities in Pekanbaru include things about the government concern for disabled people is done through organization welfare associations with disabilities (PKPC). Organization welfare associations with disabilities is an organization or institution whose existence is expected to play an active role in the struggle for justice and welfare rights for people with disabilities as citizens as well as delete a variety of views and poor judgment against the disabled. To determine the role of government to the people with disabilities can be seen from the questionnaires distributed. Researchs to test the validity and reliability to 30 samples to determine whether the question in the questionnaire can answer the problem of research. Researchers using Spearman correlation analysis because the collected in the from ordinal data. The results of research know of the role of government against people with disabilities, although got as expected.

Keyword: People With Disabilities, The Role Of Government, Organization Welfare Associations With Disabilities.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Edi Suharto, 1997: 97). Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas. (Depsos RI, 1996:17).

Penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasikan dan sering didiskriminasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap

keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang disabilitas sebagai makhluk lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat. Masih kurangnya perhatian pemerintah atau negara terhadap penyandang disabilitas membuat kondisinya semakin terpuruk dan terpinggirkan. Walaupun saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan keberadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai *Stake Holder*, sehingga implementasi dari berbagai kebijakan tersebut selalu tidak menyentuh sisi penting kehidupan penyandang disabilitas.

Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC) bersama beberapa organisasi difabel yang ada di Pekanbaru seperti, Spesial Olympic Indonesia (SOIna) Riau, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) daerah Riau, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) daerah Riau dan Ikatan Tuna Netra Riau (ITNR) merupakan lembaga yang keberadaannya diharapkan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai warga

negara melihat pentingnya persamaan dan kesamaan cara pandang terhadap keberadaan dan pemberdayaan difabel serta menghapus berbagai pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas.

Adapun tujuan di bentuknya organisasi tersebut adalah :

- Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tentang kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta peran penyandang disabilitas sebagai warga negara.
- Meningkatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Menurut Charles P.Loomis (Sosiologi Pedesaan Strategi Perubahan 1964:76) peran status dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu. Peran status adalah aspek aktif dari posisi dan fungsi serta proses statis dari struktur. Peran juga merupakan perilaku seorang dalam status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban. Peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto didalam suatu buku pengantar sosiologi mengemukakan bahwa kata peranan ini

mempunyai sedikitnya tiga pengertian yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi-posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang di dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai anggota organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial (Soerjono, Soekamto, 1987:243-244).

Soelaeman (Pendidikan dalam keluarga 1994:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan suatu peran tertentu tidak tampil dalam bentuk yang seragam, melainkan disamping berkaitan dengan siapa yang dihadapi atau dengan siapa ia berkomunikasi, tergantung juga dari situasi yang menyertai permainan peran tersebut. Peranan itu dapat tampil sebagai suatu pola tingkah yang dianggap harus dilakukan seseorang untuk memantapkan kedudukannya.

Sedangkan menurut Paul B. Horton dan Chester L.Hunt (Sosiologi Jilid 1 1996:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang memiliki sttus tertentu. Jadi setiap peranan bertujuan

agar individu yang melaksanakan peranan tersebut dengan orang-orang sekitarnya tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Oleh karena itu Gross Mason dan Mceachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Peranan individu adalah bagaimana seseorang individu menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain atau dalam kehidupan antara atasan dan bawahan.
2. Peran kelompok adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai pemberi harapan kepada orang lain (David Berry, 1995:99).

Didalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap "masyarakat" atau terhadap

orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, David Berry, 1995:101).

2.2 Penyandang Disabilitas

Cacat bukan halangan untuk menghambat seseorang untuk berkarya, demikian statement yang sering kita dengarkan dari para penyandang disabilitas, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan mobilitas kerja yang tinggi, dengan semangat itulah mendorong para penyandang disabilitas untuk tetap disetarakan tanpa ada diskriminasi, dengan memberikan perhatian yang besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Departemen Sosial Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terus berupaya untuk mensosialisasikan para penyandang disabilitas agar dapat diterima baik di instansi pemerintah maupun swasta yang lebih mengedepankan kredibilitas dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memandang faktor fisik.

Penyandang cacat terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Penyandang cacat fisik, meliputi:
 - Penyandang cacat tubuh (tuna daksa)
 - Penyandang cacat netra (tuna netra)

- Penyandang cacat tuna wicara/rungtu
 - Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)
2. Penyandang cacat mental, meliputi:
 - Penyandang cacat mental (tuna grahita)
 - Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras)
 3. Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:115) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk pelajarari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang ada dikota Pekanbaru. Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas dikota Pekanbaru adalah 701 orang dari 6 jenis penyandang disabilitas.

Sampel menurut Sugiyono (2010:90) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menjadi sampel penyandang disabilitas dengan jumlah 701 orang mengingat keterbatasan waktu serta biaya yang dimiliki peneliti maka sampel yang diambil hanya 10% dengan jumlah 89 orang.

3.2 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/nilai/ukuran ukur dapat mengukur sesuai dengan suatu kriteria yang ditetapkan dan biasanya digambarkan dengan nilai korelasi, yang disebut dengan koefisien validitas. Hasil pengukuran yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan atau memberikan skor/ nilai suatu karakteristik lain yang menjadi perhatian utama.

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan skor total variabel. Perhitungan uji validitas ini menggunakan rumus korelasi (momen Spearman) sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana :

r_s = Koefisien Korelasi Rank Spearman
 d_i = Selisih Setiap Rank
 n = Banyaknya Pasangan Data

Tabel 3.1

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

3.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α :

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000 : 3). Suatu instrument dianggap reliable apabila instrument tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 17.0 for windows.

Rumus :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

Sj = varians responden untuk item I

Sx = jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Jika alpha atau r hitung:

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

3.4 Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dimaksud untuk menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam perlindungan sosial penyandang disabilitas di pekanbaru yang diteliti, berdasarkan data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menganalisa data yang diperoleh peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas di pekanbaru dan persepsi penyandang disabilitas terhadap pemerintah tersebut. Untuk memberikan gambaran dari hasil yang penelitian, peneliti memberikan gambaran dengan menggunakan tabel-tabel statistik deskriptif yang diinterpretasikan, olahan data tersebut berdasarkan jawaban responden dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner dengan skor yang sudah di desain oleh peneliti. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilakukan analisis antara peran pemerintah dan

persepsi penyandang disabilitas terhadap pemerintah.

Peneliti dalam mempermudah melakukan analisis menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), yaitu dengan metode regresi sederhana untuk melihat pengaruh antara peran pemerintah dan persepsi penyandang disabilitas terhadap pemerintah.

Penentuan kriteria penilaian tentang persepsi penyandang disabilitas terhadap pemerintah dalam perlindungan sosial sebagai responden, maka dilakukan pengelompokan atas tiga kriteria penilaian. Dalam hal ini, digunakan skala 3 tingkat yang terdiri dari baik, cukup baik dan tidak baik. Ketiga penilaian tersebut, diberikan bobot sebagai berikut:

- a. Jawaban baik diberi bobot 3
- b. Jawaban cukup baik diberi bobot 2
- c. Jawaban tidak baik diberi bobot 1

4. PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Pemerintah adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini akan diketahui jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada

penyandang disabilitas berdasarkan program bantuan serta serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Dari pihak pemerintah merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat kita lihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tiada berujung.

4.1 Memberikan Bantuan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Bantuan yang diberikan pemerintah terhadap penyandang disabilitas seperti yang kita ketahui para penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, dan dengan keterbatasan yang mereka miliki tentunya para penyandang disabilitas tidak bisa memiliki kehidupan yang layak melalui usahanya sendiri. Keterbatasan tersebut tentunya membuat mereka tidak bisa mengupayakan kehidupannya dengan layak dan oleh sebab itu disini akan kita berikan jawaban sejauh ini adakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Walaupun bantuan yang diberikan tidak

sepenuhnya bisa memeberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan penyandang disabilitas tapi setidaknya dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dengan bantuan yang diterima dari pemerintah. Bantuan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas antara lain sembako, uang tunai, alat bantu cacat. Pemberian bantuan sembako kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan pengeluaran mereka terhadap pembelian bahan makanan pokok. Pemberian bantuan sembako dalam jangka waktu yang tidak menentu. Dalam kurun waktu satu tahun terdapat dua kali pemberaian bantuan. Bantuan sembako berupa beras, minyak, gula dan tepung. Hai ini diarsa dapat membantu meringankan beban peanyandang disabilitas. Pemberaian bantuan sembako ini sifatnya menyeluruh. Apabila dalam satu keluarga teradapat dua orang peanyandang disabilitas maka keduanya berhak mendapatkan bantuan.

Bantuan berupa uang tunai diberikan dalam kurun waktu yang tidak menentu. Biasanya diberikan bersamaan dengan pemberian sembako. Bantuan ini langsung dari pihak kementerian sedangkan dinas sosial hanya seabagai penyalur. Bantuan uang tunai yang diberikan sejumlah Rp. 300.000 perorang. Bantuan uang tunai juga merata yakni semua peanyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC) berhak menerima bantuan. Hal ini sama dengan apabila dalam satu keluarga terdapat

lebih dari satu penyandang disabilitas maka kesemua penyandang disabilitas dalam keluarga itu berhak mendapatkan bantuan uang tunai.

Bantuan alat cacat yang diberaikan srfatnya tidak menyeluruh, karena tidak semua bisa menadapatkan alat bantu cacat ini. Alat bantu cacat yang disediakan dapat berupa alat bantu dengar, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, tongkat. Alat ini tidak dibagikan secara merata karena jumlahnya yang terbatas sehingga bagi yang benar-benar membutuhkan atau pemberiannya dilakukan secara bertahap. Maksud dari pembagian bantuan yang secara bertahap ini adalah apabila penyandang disabilitas tersebut sudah menerima alat bantu cacat, maka di pemberaian alat bantu cacat sealanjutnya ia tidak berhak lagi menerima bantuan tersebut. Bantuan tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas yang belum menerima alat bantu cacat.

4.2 Memberikan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah sekumpulan manusia yang mempunyai keterbatasan dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan para penyandang disabilitas seperti halnya manusia normal lainnya. Dan oleh sebab itu para penyandang disabilitas tentunya membutuhkan bimbingan dari pemerintah yang disalurkan melalui organisasi yang mereka ikuti selama ini. Tentunya bimbingan itu bisa dilakukan dari program yang diberikan oleh

pemerintah kepada para penyandang disabilitas, dari program yang diberikan pemerintah tentunya diharapkan dapat memberikan pelajaran berupa keterampilan, usaha dan sebagainya untuk para penyandang disabilitas

Pemberian bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dapat berupa seminar ketrampilan, seminar pemberdayaan difabel. Bimbingan sosial yang dimaksudkan disini untuk membentuk karakter penyandang disabilitas yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain walaupun mereka mempunyai keterbatasan fisik. Bimbingan ini juga dimaksudkan untuk membantu membangkitkan kepercayaan diri penyandang disabilitas sehingga tidak merasa berbeda dengan orang normal lainnya, membeberatkan mereka kepercayaan diri sehingga mereka bangkit dari keterpurukan.

Pelatihan ketrampilan yang diberikan berupa membuat kerajinan tangan seperti vas bunga, tas, keranjang, anyaman tikar. Hasil kerajinan tangan ini dapat mereka jual untuk menambah penghasilan atau sekedar mengisi waktu luang. Keterampilan lain yang diberitakan adalah menjahit. Menjahit khususnya untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Keterampilan ini sangat berguna karena tidak hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang, tapi juga penambah penghasilan. Bahkan dapat menjadi penghasilan utama penyandang disabilitas. Kemudian keterampilan lain yang diberitakan adalah wirausaha bengkel dan tempat pencucian motor yang biasanya untuk penyandang cacat

laki-laki. Dari hasil pemberian keterampilan yang sudah dijelaskan, pemerintah mengharapkan penyandang disabilitas dapat hidup normal bersama dengan orang biasa dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki. Pemerintah juga mengharapkan dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki mereka tidak menjadi beban bagi orang sekitarnya sehingga mereka dapat berdiri sendiri.

4.3 Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan dan rehabilitasi merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan kita tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pelayanan dan rehabilitasi yang dimaksud disini adalah gedung, sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas seperti yang kita ketahui dari tabel sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemerintah memberikan program bagi para penyandang disabilitas maka agar program tersebut terlaksana seperti yang diharapkan tentunya para penyandang cacat berhak memiliki fasilitas untuk mereka menyalurkan bakat dan mengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan para penyandang disabilitas

Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah berupa bantuan terhadap penyandang disabilitas tuna rungu untuk dapat mengerti bahasa isyarat, bantuan kepada penyandang disabilitas tuna wicara untuk dapat dilatih agar bisa sedikit-sedikit

berbicara seperti orang normal, penyandang disabilitas tuna netra untuk diajarkan membaca tulisan braille sehingga walaupun mereka tidak bisa melihat namun tidak terganggu dalam mereka menyerap informasi melalui bahan bacaan. Kepada penyandang disabilitas yang menggunakan kaki atau tangan palsu diajarkan mereka supaya terbiasa dengan alat bantu tersebut sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baik fungsinya.

4.4 Karakteristik Sosial Difabel

4.4.1 Usia dan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini memiliki jarak usia yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar responden berusia antara 10-20 tahun sedangkan yang paling sedikit berusia antara 51-60 tahun. Berdasarkan tabel dibawah juga dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berusia 10-20 tahun, responden dengan usia tersebut rata-rata berpendidikan sekolah dasar(SD), sekolah menengah pertama (SMP). Akan tetapi dari jumlah tersebut juga terdapat responden yang tidak bersekolah.

Tabel 4.4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	24	26,96
2	Minang	31	34,83
3	Jawa	24	26,96
4	Batak	10	11,23
5	Lainnya	0	0
Jumlah		89	100,00

Sumber : Data Olah Lapangan 2015

Tabel diatas dapat kita lihat bahwa paling banyak penyandang disabilitas adalah etnis Minang, yakni berjumlah 31 dari 89 responden atau sebesar 34,83%. Hal ini dikarenakan untuk wilayah Kota Pekanbaru memang banyak terdapat penduduk dengan etnis minang. Penyandang disabilitas terbanyak kedua adalah etnis melayu dan jawa dimana memiliki jumlah yang sama yaitu berjumlah 24 orang atau sebesar 26,96% dari total 89 responden. Pengelompokan penyandang disabilitas berdasarkan etnis tidak terlalu mendapat perbedaan yang signifikan karena tidak terdapat perbandingan jumlah yang besar antar etnis.

4.4.2 Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Semua orang ingin mendapatkan ilmu yang baik dan pendidikan yang tinggi agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak, begitu juga terhadap penyandang disabilitas. Mereka juga ingin mendapatkan pendidikan yang sama seperti manusia normal lainnya. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu peran pendidikan demikian sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu peneliti tampilkan data mengenai pendidikan penyandang disabilitas.

Tabel 4.4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak berpendidikan	59	66,29
2	SD/ sederajat	6	6,74
3	SMP	24	26,96
4	SMA	0	0
5	PTN	0	0
Jumlah		89	100,00

Sumber : Data Olah Lapangan 2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas yang paling banyak adalah yang tidak berpendidikan dengan jumlah 59 atau 66,29%. Hal ini tentunya sangat memperhatikan bagi kita semua artinya dapat kita simpulkan bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan yang layak sejauh ini.

4.4.3 Pekerjaan

Pekerjaan merupakan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan memiliki pekerjaan setiap individu dapat meningkatkan kualitas finansial masing-masing, pekerjaan juga dapat meningkatkan status sosial masyarakat sehingga jenis pekerjaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan, namun kemiskinan dapat teratasi jika seseorang memiliki jenis pekerjaan yang membeikan penghasilan yang besar begitu juga sebaliknya. Untuk melihat jenis pekerjaan yang diperoleh penyandang disabilitas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	0	0
2	Wiraswasta	11	12,36
3	Buruh	15	16,85
4	Pedagang	9	10,11
5	Tidak bekerja	54	60,67
Jumlah		89	100,00

Sumber : Data Olah Lapangan 2015

Data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden terbesar pada pilihan tidak bekerja dengan nilai 60,67 % atau sebanyak 54 responden. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas memberikan mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki.

4.4.4 Pendapatan

Penyandang disabilitas di Pekanbaru tidak semuanya yang berpenghasilan karena sebagian besarnya juga merupakan ibu rumah tangga. Pendapatan merupakan keseluruhan penghasilan seseorang, dan merupakan penghasilan pribadi masyarakat itu, penghasilan juga adalah merupakan alat pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder bagi masyarakat, melalui penghasilan juga dapat kita ketahui status masyarakat tersebut dan tingkatan stratifikasinya, termasuk kedalam golongan manakah

masyarakat tersebut apakah rendah, menengah, ataupun tingkat golongan tinggikah masyarakat itu, dan untuk mengetahui jumlah penghsilan penyandang disabilitas dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1	1 juta - 2 juta	18	20,22
2	2 juta - 3 juta	13	14,60
3	3 juta - 4 juta	2	2,25
4	Tidak ada penghasilan	56	62,92
Jumlah		89	100,00

Sumber : Data Olah Lapangan 2015

Data tabel diatas menunjukkan bahwa dari 89 responden terdapat 18 responden mendapat penghasilan 1-2 juta . 13 responden berpenghasilan 2-3 juta dan yang paling banyak tidak memiliki penghasilan dengan jumlah responden 56 responden.

4.4.5 Status Perkawinan

Tabel 4.4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status perkawinan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah menikah	45	50,56
2	Belum menikah	44	49,44
Jumlah		89	100,00

Sumber : Data Olah Statistik 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini adalah dengan status sudah menikah dengan nilai 45 atau

50,56% yang mana lebih banyak terdiri dari dewasa dan remaja.

4.4.6 Jumlah Anak

Jumlah anak merupakan salah satu faktor dalam penelitian ini, dimana kita dapat melihat apakah jumlah anak dapat mempengaruhi tingkat ekonomi para penyandang disabilitas. Berikut peneliti tampilkan data hasil kuesioner.

Tabel 4.4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak

No	Jumlah Anak	Jumlah	Persentase (%)
1	0	44	49,44
2	1-2	17	19,10
3	3-4	14	15,73
4	4-5	8	8,99
5	>5	6	6,74
Jumlah		89	100,00

Sumber : data olah lapangan 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa disini jumlah anak terbanyak yaitu 17 orang anak yang berusia 1-2 tahun dan yang paling sedikit berjumlah 6 orang anak yang berusia lebih dari 5 tahun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti buat dalam tulisan ini berkaitan dengan segala upaya yang telah peneliti lakukan dalam penelitian dengan didasarkan kepada data-data yang telah peneliti kumpulkan, kesimpulan yang dapat peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan 89 responden dan 11 variabel pertanyaan tentang peran pemerintah dalam perlindungan sosial bagi penyandang cacat membuktikan bahwa adanya peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas walaupun belum seperti yang di harapkan.
2. Hasil penelitian yang dilakukan 100,0% jawaban responden berkisar pada baik, cukup baik, tidak baik untuk peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas.
3. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, tepung, dan pemerintah juga memberikan bantuan sosial berupa uang sejumlah Rp. 300,000, kepada masing-masing individu, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, kaki palsu, tangan palsu serta huruf-huruf brille.
4. Bantuan yang diberikan pemerintah dilakukan pada acara halal bilal atau buka bersama pada bulan ramadhan, hal ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi yang baik antara pemerintah dengan para penyandang disabilitas yang berada di Kota Pekanbaru.
5. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek kesesuaian bantuan

yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas terdapat 27 responden dari 89 responden menyatakan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap penyandang disabilitas tidak sesuai hal ini karena mereka merasa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhab mereka.

6. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para penyandang disabilitas yang bergabung pada organisasi PKPC mereka menginginkan pemerintah membangun fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas yang dimaksud berupa sarana dan prasarana berupa gedung yang bisa digunakan untuk setiap acara yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.
7. Dari hasil penelitian sebanyak 56 responden dari 89 responden yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja dan sebagian adalah ibu rumah tangga.

Dari hasil penelitian sebanyak 60,67% penyandang disabilitas atau sebanyak 54 responden dari total 89 responden yang tidak memiliki pekerjaan.

5.2 Saran

Dengan semakin bertambahnya jumlah penyandang disabilitas di kota Pekanbaru seharusnya menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah. Pemerintah tidak hanya sebagai lembaga yang hanya memperhatikan kehidupan sosial dari penyandang disabilitas. Pemerintah juga harus

memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagai sarana untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, sarana yang dimaksud berupa gedung yang dapat digunakan pada acara-acara besar yang dilakukan penyandang disabilitas termasuk acara silaturahmi dengan pemerintah. Sejauh ini persoalan tentang fasilitas bagi penyandang disabilitas masih sebatas wacana yang belum terwujud.

Tingkat pendidikan bagi penyandang disabilitas juga harus diperhatikan karena selamanya ini banyak penyandang disabilitas yang berpendidikan sampai sekolah menengah pertama (SMP) bahkan masih dijumpai penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik tentunya akan memberikan kehidupan yang lebih bermanfaat bagi penyandang disabilitas sehingga keberadaan mereka didunia kerja masih bisa dipertaruhkan. Dengan memiliki pekerjaan diharapkan para penyandang disabilitas dapat memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Suharto,Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Spektrum Pemikiran, Bandung. Lembaga Studi Pembangunan-STKS.

Charles P. Loomis dan J. Allan Beegle. 1964. *Sosiologi Pedesaan (Strategi*

Perubahan) di Indonesia Oleh Alimandau SU. Prentice-Hall, INC.

Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Paul B. Horton dan Charles L. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta. Erlangga.

Soekamto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* Jakarta. CV Rajawali.